

PENGETAHUAN POLITIK PEMILIH PEMULA TENTANG PEMILU 2019

(Studi kasus mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya)

SKRIPSI



Oleh :

Kasidar (07021381520075)

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

2019

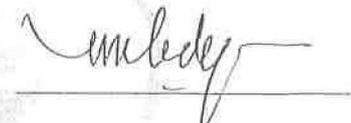
HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal Dengan Judul “Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Tentang Pemilu Tahun 2019” Telah Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 17 Oktober 2019.

Indralaya, Oktober 2019

Pembimbing:

1. Dr. Ridhah Taqwa M.Si
NIP. 196612311993031018
2. Dra, Hj Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002
3. Dr. Drs. Tri Agus Susanto, M.Si
NIP. 195808251982031003
4. Mery Yanti, S.Sos., MA
NIP. 197705042000122001



Mengetahui:

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Yunindyawati, S.Sos.,M.Si
NIP.197506032000032001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGETAHUAN POLITIK PEMILIH PEMULA TENTANG
PEMILU TAHUN 2019**

SKRIPSI

OLEH:

**KASIDAR
07021381520094**

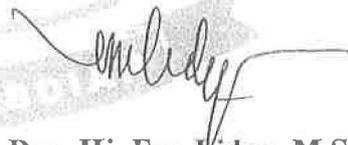
Palembang, Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

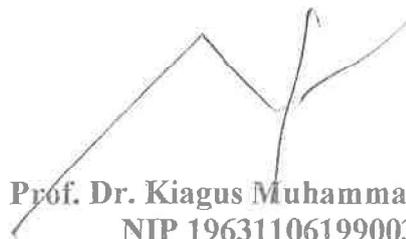


**Dr. Ridlah Taqwa
NIP.196612311993031018**



**Dra. Hj. Eva Ildiya, M.Si
NIP. 195910241985032002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP 196311061990031001**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kejarlah terus menerus walau harapan selalu pupus”
“Berterima kasihlah kepada otak, kalau tak ada Otak kau akan dianggap tak punya otak”*

.KASIDAR.

PERSEMBAHAN KEPADA

1. Kepada Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kepada kedua orang tua
4. Kepada saudara-saudaraku
5. Kepada sahabat dan teman-temanku
6. Kepada dosen pengajar di FISIP
7. Kepada semua yang pernah saya kenal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berat dan rahmat serta kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang mengambil judul “Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Tentang Pemilu Tahun 2019”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) bagi mahasiswa program S-1 diprogram studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang paling utama kepada keluarga besar Bapak **Abdullah dan Ibu Misnah** sebagai orang tua saya dan untuk kakak-kakak saya **Kasri, Kasmala dan Kasito** yang telah memberikan sumbangan motivasi, materil, semua dukungan yang selalu mereka berikan sejak saya lahir sampai sekarang saya akan mendapatkan gelar sarjana Sosiologi ini dan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MscE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr Alfitri, M, Si Selaku Pembantu Dekan 1 (PD 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si Selaku ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridhah Taqwa, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I
6. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M. Si selakung pembimbing Skripsi II
7. Mbak Irma selaku administrasi program studi Sosiologi dan Mbak Raflesia Adesti
8. Terima kasih kepada semua informan yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sangat banyak berterima kasih kepada Sahabat-Sahabat saya selama diperantaun, Mojo(teman sekosan), Raffi(Lucky boy), Alvie (Banci Branded), Dwi(Bujang lemes),

Faisal(Saipul), Amsal(Mami Boy). Juga untuk seluruh teman-teman mahasiswa Sosiologi angkatan 2015

10. Terima kasih kepada teman seperjuangan mengejar dosen, Intan mawarni.
11. Kepada teman seperjuangan dari Bangka Belitung, Dabon, win, Viki, Feri.
12. Dan teman-teman baru Wisnu, Yunus, Adan, Adin, Iam, Aldo dan anak Ilmu komunikasi yang saya kenal.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Palembang, Juli 2019

Kasidar
NIM:07021381520075

DAFTAR ISI

HAHALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGIAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
2.2.1 Teori Pengetahuan Politik	18
2.2.1 Sumber pengetahuan Politik.....	20
2.2.2 Konsep Pemilih Pemula	20
2.2.3 Konsep Pemilu 2019.....	21
2.2.4 Konsep Pandangan Politik.....	22
2.2.5 Konsep Sosialisasi Politik	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
1.1 Desain Penelitian	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Strategi Penelitian	26
3.4 Fokus Penelitian.....	27
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.6 Penentuan Informan	28
3.7 Peran Penelitian	29
3.8 Unit Analisis Data.....	29
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	31
3.11 Teknik Analisis Data.....	33
3.12 Jadwal Penelitian	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
4. 1 Gambaran Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.....	36
4.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FISIP UNSRI.....	36
4.1.2 Strukur Pemimpin FISIP UNSRI.....	38
4.2 Kondisi geografis	39

4.3 Kondisi Demografis	39
4.4 Gambaran Informan	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Tentang Pemilu Tahun 2019	45
5.1.1 Pengetahuan Tentang Dasar Hukum Pemilu Tahun 2019	47
5.1.2 Pengetahuan Tentang Tata Cara Mencoblos	49
5.1.3 Pengetahuan Tentang Persyaratan Pemilih	50
5.1.4 Pengetahuan Tentang Larangan Dan Sanksi	52
5.5.1 Pengetahuan Tentang Calon Anggota Legislatif	54
5.1.6 Pengetahuan Tentang Visi Misi Calon	55
5.2 Sumber Informasi Pemilu 2019	58
5.2.1 Media	58
5.2.2 Pendidikan Oleh KPU	60
5.2.3 Pendidikan Formal	62
5.2.4 Organisasi	64
5.2.5 Isu-isu Yang Didapatkan Informan	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAPTAR TABEL

Tabel. 1.1 Latar Belakang

Tabel. 2.1 Penelitian Terdaulu

Tabel. 4.3 Kondisi Demografis

Tabel. 4.3.1 Umur Mahasiswa

Tabel. 4.3.2 Jumlah Pengurus Organisasi

Tabel. 4.4 Informan Mahasiswa

DAFTAR BAGAN

Bagan. 2.2.1 Kerangka Pemikiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 3.12 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk memilih sendiri pemimpinnya, termasuk pemilih pemula yang sudah cukup umur. Pemilih pemula cenderung mempunyai sikap apatisme dan pragmatisme sehingga mudah menerima informasi yang salah atau *HOAX*. Rumusan masalah adalah untuk memilih Presiden wakil presiden dan anggota legislatif ?, Bagaimana pemilih pemula mendapatkan informasi tentang pemilu 2019. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki pemilih pemula dalam menghadapi pemilu tahun 2019. Menggunakan landasan teori pengetahuan tentang proses pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis sumber data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*. Unit analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Teknik pengumpulan data, Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Triangulasi, Kondensasi data. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwasanya Pengetahuan pemilih pemula dalam kegiatan politik pemilu tahun 2019 ini masih minim, mereka tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur pemilu tahun 2019, dengan adanya sistem pemilihan yang baru memberikan kebingungan sebagian orang. Pendidikan politik atau sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula tidak cukup efektif dan perlu ditingkatkan Pemilih pemula lebih tertarik kepada pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Media massa seperti *Instagram*, *youtube*, *Line* mempunyai peran penting dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam proses penerimaan informasi

Kata kunci: Pengetahuan, Pemilih Pemula, Pemilu.

Palembang, September 2019

Mengetahui

Pembimbing I



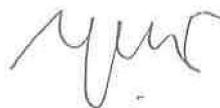
Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP:196612311993031018

Pembimbing II



Dra. Hj Eva Lidya, M.Si
NIP: 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP: 197506032000032001

Abstrack

Indonesia is a country that uses a democratic system that gives its people the right to choose their own leaders, including novice voters who are old enough. Novice voters tend to have an attitude of apathy and pragmatism so that it is easy to accept wrong information or HOAX. The formulation of the problem is to elect a vice president and a member of the legislature ?, How do the first time voters get information about the 2019 election. The writing of this thesis aims to find out the knowledge possessed by the novice voters in dealing with the 2019 elections. knowledge. The method used is a qualitative method. Primary and secondary data source types. The technique of determining the informants used in this study is purposive. Data analysis data collection units, data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification. Data collection techniques, observation, interviews, documentation. Triangulation, Data condensation. Based on the analysis that has been done that the knowledge of beginner voters in the 2019 election political activities is still minimal, they do not know the legal basis governing the 2019 elections, with the existence of a new electoral system that gives some people some confusion. Political education or election outreach to novice voters is not effective enough and needs to be improved. Novice voters are more interested in presidential elections than legislative elections. Mass media such as Instagram, YouTube, Line have an important role in providing knowledge to students in the process of receiving information

Keywords: Knowledge, Beginner Voters, Elections.

Palembang, September 2019

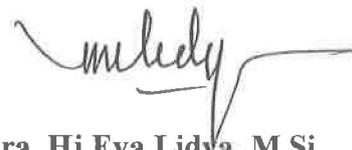
Mengetahui

Pembimbing I



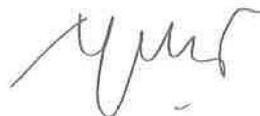
Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP:196612311993031018

Pembimbing II



Dra. Hj Eva Lidya, M.Si
NIP: 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si
NIP: 197506032000032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilu merupakan sesuatu proses pemilihan yang melibatkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, Seperti Eksekutif dan Legislatif untuk jangka waktu jabatan lima tahun. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan umum untuk memilih Presiden wakil presiden dan anggota DPR/DPRD. Pemilihan umum 2019 merupakan pemilu pertama yang menggabungkan dua jenis pemilihan secara bersamaan.

Pemilihan umum tahun ke tahun memiliki perbedaan, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004. Rakyat mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpinnya secara langsung karena sebelumnya dipilih oleh MPR, sekarang untuk pemilihan pada tahun 2019 memiliki perubahan yang menggabungkan dua jenis pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan.

Perubahan ini tentunya mempunyai banyak hal yang juga yang perlu diperhatikan bukan hanya perubahan tentang dasar hukum atau aturan yang ada melainkan juga perubahan sikap, partisipasi ataupun pengetahuan pemilih terhadap perubahan tersebut. Bagaimana pengetahuan pemilih dari setiap pemilu dimulai pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kali dilakukan secara demokrasi, dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden. Pemilu tahun 2004 merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, masyarakat harus mengetahui apa saja yang menjadi aturan dalam proses partisipasi yang dilakukan dan pendalaman secara menyeluruh agar mampu mencapai angka partisipasi yang sesuai dan ideal. Dasar hukum pemilu tahun 2004 diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan kedudukan MPR serta UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik untuk memilih 550 anggota DPR. Pada tahun 2004 partai yang mendapatkan suara

terbanyak adalah partai Golkar dengan 120 kursi/parlemen. Pemilu dilakukan dua putaran, pertama untuk memilih anggota DPR agar bisa mengusulkan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh partai yang mencapai lima persen suara sah nasional dan tiga persen kursi parlemen. (KPU.id)

Pemilu tahun 2004 juga tidak terlepas dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berdemokrasi. Dalam proses sosialisasi ini KPU mempunyai tema kunci. Tema kuncinya adalah “Pastikan anda terdapat sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib bangsa dan gunakan hak pilih anda dengan bijak” tema tentang “ketentuan hukum pelanggaran kampanye”. Metode yang digunakan untuk penyampaian informasi adalah tatap muka, melalui media massa dan mobilisasi sosial seperti rapat kerja, workshop, tranining of trainer, media cetak maupun elektronik audio visual. Yang menarik sosialisasi dilakukan secara tradisional seperti menggunakan media seperti Ketoprak, ludruk, wayang kulit, publikasi dalam bahasa daerah, sayembara lomba yang berkaitan dengan materi pemilu. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat. . Pemilih yang terdapat sebanyak 148.000.369 dan yang menggunakan hak pilihnya 124.420.339 suara (84,1%). Angka partisipasi 84,1 persen menurun dari tahun 1999 yang menyentuh angka 92,6 persen. Penurunan angka partisipasi ini menurut Riset internal KPU dikarenakan perilaku korupsi.

Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu ketiga masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan pemilihan presiden diselenggarakan setelah pemilihan anggota legislatif pada tanggal 8 Juli 2009. Dasar hukum pemilu tahun 2009 diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu anggota legislatif 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai nasional dan 6 partai Aceh. Adapun kendala pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 antara lain permasalahan distribusi logistik, Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat, Data DPT kurang tepat, menyebabkan kecurigaan, Banyak

munculnya kampanye negatif, Angka partisipasi 70,9% turun dari pemilu 2004 84,1%.

Pemilu tahun 2014 dilaksanakan menurut UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, dan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, memperebutkan 560 kursi di DPR, diikuti 12 partai nasional dan 3 partai Aceh, Kendala pada pemilu tahun 2014 ini adalah Sosialisasi kandidat calon legislatif, masih soal figur ketimbang program kerja, Sosialisasi pelaksanaan pemilu yang kurang menarik masyarakat, Persoalan data DPT, menyebabkan kecurigaan masyarakat, Pendistribusian kedaerah-daerah, Money politik, angka Partisipasi 75,2 % naik sekitar 4%.

Pada pemilihan tahun 2019 merupakan hal yang baru, dikarenakan adanya beberapa persyaratan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk setiap partai yang melakukan kegiatan kampanye, seperti Partai peserta pemilu boleh memasang gambar presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, logo partai baru tidak akan terpasang di surat suara, dalam artian bagi partai politik yang mengusulkan calon Presiden dan calon wakil presiden, maka logo partai akan dicantumkan dalam surat suara, tetapi bagi parpol yang hanya mendukung, maka logo parpol tidak dicantumkan dalam surat suara. Beberapa perbedaan antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019 yaitu:

1. Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak. Pemilihan umum serentak ini didasari dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tentang pilpres yang mengatur pelaksanaan pemilihan presiden tiga bulan setelah pelaksanaan pemilihan legislatif yang tidak dilakukan secara serentak dan sudah dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pelaksanaannya dilakukan pada 17 April 2019 yang nantinya para pemilih diberikan lima surat suara untuk dibawa kebilik untuk dicoblos. Lima surat suara tersebut untuk memilih Presiden dan

wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. (kompas.com)

2. Jumlah Partai Politik bertambah yang sebelumnya pada tahun 2014 ada 12 partai politik yaitu, NASDEM, PKB, PKS, PDIP, GOLKAR, GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PPP, HANURA, PBB, PKPI dan juga diikuti tiga partai Aceh PDA PNA, PA. Sementara Pada pemilu tahun 2019 ini diikuti sebanyak 16 partai politik Nasional yaitu, PKB, GERINDRA, PDIP, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT dan empat partai lokal Aceh yakni Partai SIRA, Partai Aceh, Partai daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh yang hanya untuk Provinsi Aceh.
3. Calon anggota DPR yang ikut pada pemilu tahun 2019 ini berjumlah 7.968 orang bertarung di 80 dapil dan memperebutkan 575 kursi parlemen.
4. Presidential Threshold menggunakan hasil pemilihan Legislatif tahun 2014. Artinya partai politik atau gabungan partai politik harus mempunyai dua puluh persen kursi di DPR atau dua puluh lima persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. (Kumparan.com)

Kegiatan politik mempunyai kendala atau sebuah masalah yang akan muncul terutama dalam hal yang berbau konflik Sara, Agama, Etnis dan kebudayaan didalamnya. Perkembangan teknologi yang mudah diakses atau didapatkan dari mana saja seperti media massa. Karena hal yang menjadi kunci dari proses penegakan demokrasi adalah kebebasan pers atau berpendapat. Kegiatan politik harus mempunyai tujuan yang harus dicapai agar semua kalangan bisa mengerti tentang sistem politik Indonesia saat ini, dalam proses demokrasi perlunya komunikasi yang membuat suatu sistem berjalan.

Demokrasi membutuhkan suatu penekanan penting mengenai komunikasi politik dan pengetahuan politik, karena dengan mengerti tentang pengetahuan politik, pemilih tidak akan mudah menerima suatu informasi secara gamblang dan harus lebih kritis lagi terhadap suatu informasi. Pokok pembahasan ialah penekanan tentang pengetahuan tentang politik yang berfokus kepada pemilih

pemula yang masih bersifat pragmatis terhadap isu-isu politik agar lebih meningkatkan partisipasi pada pemilu tahun 2019. Pada setiap Pemilu terjadinya penurunan dari tahun ke tahun, jadi peran pemilih pemula disini harus lebih ditekankan untuk meminimalisir angka Golput.. (KPU.id)

Pemilihan umum mempunyai banyak kendala atau hambatan yang dialami setiap pelaksanaannya, dimulai dari tahun 2004, 2009 dan 2014 semuanya mempunyai kendala, hambatan atau masalah yang dihadapi seperti beberapa hal ini:

Table.1.1

Tahun	Kendala dan Hambatan
2004	<ul style="list-style-type: none"> •Pengelolaan anggaran, tidak ada transparansi •Kelemahan dari segi regulasi •Sistem pengawasan yang tidak optimal •Tertutupnya ruang partisipasi •Sosialisasi yang kurang efektif, tidak menarik bagi masyarakat. •Angka partisipasi 84,1% turun dari pemilu sebelumnya 92,6 %
2009	<ul style="list-style-type: none"> •Permasalahan distribusi logistik •Kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat •Data DPT kurang tepat, menyebabkan kecurigaan •Banyak munculnya kampanye negatif •Angka partisipasi 70,9% turun dari pemilu 2004 84,1%
2014	<ul style="list-style-type: none"> •Sosialisasi kandidat calon legislatif, masih soal figur ketimbang program kerja •Sosialisasi pelaksanaan pemilu yang kurang menarik masyarakat •Persoalan data DPT, menyebabkan kecurigaan masyarakat •Pendistribusian kedaerah-daerah •Money politik •Kekerasan politik •Angka Partisipasi 75,2 % naik sekitar 4%

Sumber: website KPU RI

Tabel diatas menjelaskan angka partisipasi pada tahun 2004 dan 2009 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan. Penurunan pada tahun 2004 dan 2009 disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu masih kurang, termasuk pengetahuan tentang berbagai macam hal seperti dasar hukum pemilu, larangan dan sanksi pemilu, tata cara mencoblos, persyaratan pemilih. Jadi harus adanya peningkatan pengetahuan tentang pemilihan umum untuk masyarakat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih serta PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dibagi kedalam suatu pokok pembahasan yang sudah dibatasi agar lebih terfokus kepada konteks pemilu tahun 2019. Sub-sub bagian yang akan menjadi pokok masalah adalah pengetahuan pemilih pemula tentang landasan hukum pemilu tahun 2019, larangan dan sanksi pemilu, informasi apa yang didapatkan, pengetahuan pemilih pemula tentang Visi misi calon, proses mendapatkan informasi dan instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan tentang tata cara memilih, proses pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan KPU, keterlibatan Tenaga pengajar dan organisasi dalam membantu pemilih pemula untuk memahami masalah yang terjadi di pemilu tahun 2019.

Pengetahuan pemilih pemula lebih terpengaruh kepada isu-isu politik terkini dalam memberikan suara mereka, bukan sekedar memilih berdasarkan perasaan setia atau loyalitas kepada calon atau partai tertentu, akibatnya pola pemilihan menjadi lebih mudah berubah. Partai dan calon juga telah merespon masalah ini dan mereka berusaha menggunakan media massa secara lebih efektif. Taktik partai politik dan calon seperti ini telah membantu meningkatkan dominasi media massa yang dalam melumrahkan dan mempribadikan politik dan mungkin telah mendorong aliensi publik dari politik inkovensional. Beck (1997:144) dalam Keith Faulks.

Peraturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Pertama yang harus dilakukan ialah mengetahui tentang dasar hukum pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum Tahun 2019.

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017:

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara umum, bebas, jujur, rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan. (Kemlu.co.id)

Pemilihan umum tahun 2019 juga menetapkan larangan dan sanksi dalam melakukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk , peserta dan tim kampanye yang tertuang kedalam pasal 280/288 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain adalah :

1. Mempersoalkan pancasila dan UUD RI 1945, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia, menghina seseorang, Agama, Ras , Suku, Golongan, calon atau peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok. Merusak fasilitas negara, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye, dan menjanjikan uang atau materi lainnya.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk ikut kedalam kampanye salah satu calon, seperti ketua MK, Hakim Agung, jajaran BPK dan anggota, Bank Indonesia, pejabat negara dan warga negara yang tidak memiliki hak memilih seperti TNI/POLRI.
3. Sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu yang terbukti melakukan kegiatan menjanjikan, memberikan uang, materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung dan tidak langsung adalah pembatalan nama dari daptar calon tetap dan pembatalan anggota yang sudah terpilih. (Kemlu.co.id)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga menjelaskan tata cara memilih yang tercantum dalam pasal 41/42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara seperti:

- a. Menuju bilik suara
- b. Membuka surat suara lebar-lebar
- c. Mencoblos suarat suara dengan paku
- d. Melipat kembali suarat suara
- e. Memasukan surat suara kedalam kotak suara tergantung jenis pemilihan
- f. Mencilupkan salah satu jari kedalam tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilih. (KPU.id)

Teknologi merupakan hal yang mutlak dalam membantu manusia dalam mempermudah kehidupan, termasuk kemudahan mendapatkan informasi berita yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Pada pemilu 2019 ini media sangat berperan penting dalam proses sosialisasi ataupun kampanye politik peserta pemilu. Juga setiap orang mempunyai akses untuk membuat atau menyebarkan berita sangat cepat. Memungkinkan informasi yang tersebar tidak jelas kebenarannya.

Pemilih pemula diharapkan menggunakan dengan bijak dengan teknologi yang digunakan dalam menyikapi kegiatan politik tahun 2019 ini. Seperti lebih menekankan kepada Visi Misi calon, latar belakang calon ketimbang isu atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. Karena media terkadang menjadi hal yang sangat tidak stabil dalam memberikan sebuah informasi dan hal tersebut malahan membuat orang tertarik dengan hal tersebut.

Seperti dilansir oleh detik news sejak bulan Agustus 2018 sampai April 2019 sebanyak 1.731 Hoax (berita bohong) menjelang pencoblosan pemilu 2019. Kategori berita bohong (Hoax) berhasil diidentifikasi oleh kominfo.

1. Kategori Politik: 620 Hoax
2. Kategori Pemerintahan: 210 Hoax
3. Kategori Kesehatan: 200 Hoax
4. Kategori Fitnah: 159 Hoax
5. Kategori Kejahatan: 113 Hoax

Menurut fakta tersebut dapat dikatakan informasi tentang pemilu tahun 2019 banyak sekali berita bohong atau hoax. Hal ini perlunya pemahaman pemilih, terutama pemilih pemula dalam mendapatkan akses informasi dan mampu menelaah berita tersebut secara baik agar tidak mendapatkan informasi bohong.

Pengetahuan merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap umat manusia, karena pengetahuan dapat membantu manusia dalam proses pengambilan sikap dalam kehidupan, seperti mengamati sebuah masalah dan mencoba mencari solusi agar mampu memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan dapat didapatkan dari berbagai macam hal seperti penginderaan yang kita miliki. pengetahuan bisa didapatkan jika sesuai dengan objek yang kita perhatikan, tergantung bagaimana

kita tertarik kepada objek tersebut dan konsisten terhadap objek tersebut, agar menghasilkan sebuah penggambaran yang lebih ideal dan pemahaman secara menyeluruh terhadap objek tersebut.

Pengetahuan sangat dibutuhkan untuk membantu menganalisis proses kegiatan politik. Proses kegiatan politik memiliki banyak hal yang harus dijadikan sebagai pokok masalah agar bisa melakukan sebuah pengamatan dan menjadikannya sebagai pengetahuan. Kegiatan politik tidak terlepas dari isu-isu atau masalah politik yang menjadikan sesuatu yang menarik untuk individu mengamati proses kegiatan politik seperti pemilu tahun 2019.

Pemilih harus mempunyai pengetahuan tentang berbagai macam hal tentang proses demokrasi atau proses pemilihan umum. Pemilih dituntut mampu berpartisipasi dengan baik, supaya tidak timbul sesuatu yang bersifat pragmatis dan apatis dalam proses partisipasinya. Banyak hal yang harus diperhatikan agar mampu memberikan pengetahuan yang sesuai dan bermamfaat untuk membantu masyarakat, dalam mengikuti kegiatan politik pemilu 2019.

Peran lembaga penyelenggara seperti KPU sangat dibutuhkan untuk mremberikan pengajaran atau sosialisasi kepada pemilih. Seperti pemahaman tentang dasar hukum yang digunakan pemilu 2019, tentang siapa calon presiden maupun legislatif, pengetahuan tentang latar belakang calon, tentang partai partai yang ikut berpartisipasi, larangan didalam proses pemilu serta sanksinya, proses sosialisasi yang dilakukan dan bagaimana pemilih pemula ini mengambil suatu pandangan dan tindakan terhadap informasi yang didapatkan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga menjelaskan apa saja yang menjadi bagian dari sosialisasi yang akan diberikan kepada para pemilih dan yang menjadi sasaran untuk sosialisasi adalah masyarakat umum, pemilih pemula, penyandang disabilitas dll.

Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap 17 tahun atau lebih yang sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pemilihan yang bulat. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan, ketidaktahuan dalam politik praktis, terlebih dengan pilihan dalam pemilu membuat pemilih pemula sering tidak bersikap rasional dan lebih memikirkan jangka pendek. (Suhartono, 2009:6)

Tingkat keantusiasan pemilih pemula ini harus dibenahi tentunya dari proses sosialisasi, dengan adanya sosialisasi yang baik maka pemilih pemula yang kurang mengetahui dan tertarik terhadap politik lambat laun tertarik dan menggunakan hak suaranya dengan bijak. Untuk meminimallisir adanya kesalahan atau ketidaktahuan pemilih pemula, KPU, Banwaslu, Kominfo melakukan suatu upaya memberikan sosialisasi tentang “ *Bersama pemilih milenial perangi HOAX jelang pemilu*”, agar pemilih pemula ini tidak mudah dipengaruhi atau dipolitisasi oknum untuk menyebarluaskan berita HOAX yang akan berdampak kepada pengetahuan pemilih pemula.

Masalah yang akan dihadapi oleh pemilih pemula dan mempengaruhi dalam menentukan pilihannya sebagai pemilih dan sangat mengganggu perolehan suara yang akan diperoleh, sebagai tolak ukur suatu keberhasilan suatu proses pemilihan umum ataupun pemilu. Tingkat keantusiasan pemilih pemula juga harus diperhatikan dari tahun ke tahun karena hal tersebut menjadi tingkat keberhasilan suatu pemilu.

Pemilu tahun 2019 akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah cukup umur dan punya hak memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) sendiri telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) dalam skala Nasional. Total pemilih 192.828.520 orang, Terdiri dari pemilih laki-laki 96.271.476 orang dan pemilih perempuan 96.557.044 orang. DP4 (Daptar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebanyak 5.035.887 skala nasional. Kota Palembang sendiri yang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan mempunyai daptar pemilih sebanyak 1.099.633 jiwa. DP4 Palembang sebanyak

33.560 jiwa. Pemilih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UNSRI sebanyak 1.375 orang dan pemilih angkatan 2018 sebanyak 304 mahasiswa.

Pemilu legislatif Kota Palembang faktor figur calon legislatif akan mempengaruhi kemenangan parpol, karena calon wakil rakyat akan bekerja mempengaruhi kinerja parpol, dalam memperebutkan kursi diparlemen lokal, dalam pilkada kepala daerah dukungan parpol kepada pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada. Pasangan calon *Incumbent* atau pertahana mendominasi kemenangan kepala daerah yang didukung oleh Partai Golkar dan PDIP. (Alfitri, 2008 : Dinamika partai politik)

Pemilih pemula yang menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik ataupun berada dalam lingkungan politik dalam proses belajar yang sudah mempelajari politik di mata kuliah pengantar ilmu politik walaupun sebagian tidak secara mendalam. Apakah dengan atau sudah mempelajari politik masih bersifat apatis dan pragmatis didalam individu mahasiswa dan seberapa dalam pengetahuan politik mahasiswa.

Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual. Mahasiswa banyak melakukan kegiatan kampus, seperti kegiatan belajar, berorganisasi, dan bersosialisasi antar sesama mahasiswa agar lebih banyak mendapatkan pengalaman didalam masa perkuliahan, Sebagai mahasiswa yang sudah masuk kedalam ranah politik agar tidak terjadinya sifat apatis dan pragmatis dari mahasiswa dalam menyikapi tahun pemilu 2019..

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa angkatan 2018 tentang pemilu 2019 untuk memilih Presiden wakil presiden dan anggota legislatif ?
2. Dari mana pemilih pemula mendapatkan informasi tentang pemilu 2019?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang pemilu 2019 dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilakukan bersamaan.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui media apa yang digunakan pemilih pemula dalam mendapatkan informasi politik.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Sosiologi Politik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengajar dalam memberikan pembelajaran mata kuliah Sosiologi Politik kepada mahasiswa.

6.2 Saran

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua elemen, baik untuk Pemerintah, KPU(Komisi Pemilihan Umum), terutama pemilih pemula ataupun organisasi sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dimasa yang akan datang terkait pemilu.

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait pengetahuan pemilih pemula tentang politik, dan sarana apa yang diperlukan untuk menunjang pemilih pemula agar lebih tertarik kepada kegiatan politik, bukan hanya menarik pemilih pemula kepada isu-isu saja melainkan, diharapkan pemilih pemula ini lebih mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dari kegiatan politik itu sendiri.
2. Bagi pemerintah (KPU), diharapkan lebih memberikan ruang atau sarana prasana terkait ruang diskusi untuk mahasiswa agar mahasiswa lebih peka atau lebih mendalami kegiatan politik itu sendiri dari segala bidang, agar terciptanya mahasiswa yang mempunyai integritas yang lebih tinggi yang memahami dalam berbagai aspek politik. Memberikan kegiatan sosialisasi yang baik dan menarik untuk pemilih pemula.
3. Bagi aktor politik atau peserta pemilu diharapkan lebih memberikan solusi yang nyata dalam menarik minat pemilih pemula jika ingin dipilih oleh pemilih pemula dalam pagelaran pemilu legislatif.
4. Untuk mahasiswa pemilih pemula, diharapkan lebih mengetahui apa yang menjadi dasar hukum atau atauran yang telah ditetapkan bukan hanya lebih tertarik kepada isu yang dibangun.
5. Untuk organisasi, lebih memberikan lebih banyak ruang untuk kegiatan yang membawa kearah positif seperti diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Bungin, H, M. 2007. *Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*. Jakarta:Kencana Predana Media Group.
- Congara, Hafied. 2009. *Komunikasi politik (konsep teori dan strategi)*. Jakarta: Rajawali pers.
- Creswell, J. S. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice. 1996. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Faulks, Keith, 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media
- Heryanto, G. G. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCISOD
- Ilham, N. 1998. *Contoh Metode penelitian* , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: pustaka pelajar.
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. 2012. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Setiadi, M. E. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
Teori sosiologi , Goerge Ritzer Edisi kedelapan tahun 2012.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Strafindo Persada

Soekidjo, Notoadmdjo, 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

Alfitri, Alfitri (2008) Dinamika Partai Politik di Sumatera Selatan. *Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2 (5). pp. 421-427. ISSN1410-8429

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=258237&val=7023&title=DINAMIKA%20PARTAI%20POLITIK%20DI%20SUMATERA%20SELATAN>

DPR.(2008) Undang-Undang RI No 10 Tahun 2008 (22November2018)

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf

Siska Sasmita. (2011). Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu/Pemilukada.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38692998/abstrak.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1548856618&Signature=jMMch0QtmwfdumZUzPZ12fNGx5w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPERAN_INFORMASI_POLITIK_TERHADAP_PARTISI.pdf

Stevanus, Devi Suhardian, 10144300090 (2016) Persepsi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2014 di SMTA Se-Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo. Skripsithesis, Universitas PGRI Yogyakarta

<https://repository.upy.ac.id/779/a>

Triastari, Diajeng (2011) Persepsi Iklan Politik Pada Pemilih Pemula (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Iklan Politik Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilu 2009 di Media Televisi). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

<https://eprints.uns.ac.id/6393/>

Wahyu Rahma Dani , 3401405062 (2010) Paertisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

<https://lib.unnes.ac.id/3033/>

Zulaeni Esita (2014). Pengaruh Kelompok Rujukan dan Kepribadian Otoritarian Terhadap perilaku Memilih pada Pemilih Pemula

<http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/73>

Sumber internet

Fachrudin. (2017) Menyelamatkan Pemilih Pemula. Tersedia <https://news.detik.com/kolom/4240110/menyelamatkan-pemilih-pemula> 22 (22 desember 2018)

Irawan. (2018) Milenial dan Pilpres. Tersedia <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/millenial-dan-pilpres-2019-27431110790558842> (18 November 2017)

KPU.(2018). Bersama Pemilih Milenial Perangi HOAX Jelang Pemilu <https://kpu.go.id/index.php/pages/index/Njkz> (21 Desember 2018)

KPU. (2018). Tata Cara dan Syarat Pencoblosan <https://kpu.go.id/index.php/pages/index/Njkz> (21 Desember 2018)

www.Unsri.ac.id